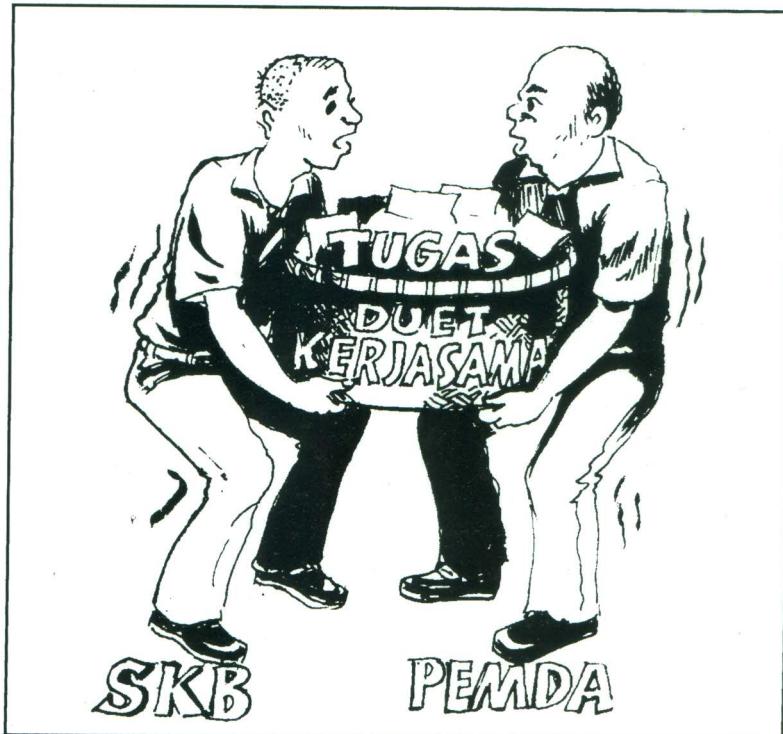




Gita Setra

HIMBAUAN DARI DAN UNTUK LAPANGAN

ISSN : 0854 - 4956





Daftar Isi

Gita Selingan

Menyongsong Otonomi
Daerah Peluang dan
Tantangan SKB, 23

Globalisasi dan Dampaknya
pada Tatatan Keluarga,
28

Gita Utama

Konsep dan Strategi
PLS dalam Upaya
Pengentasan
Kemiskinan, 1

Penanggungjawab: Kepala BPKB Jayagiri; **Pemimpin Redaksi:** Drs. Dayani Arokmani;
Dewan Redaksi: Drs. Safuri, M.Pd., Merry Mariam, M.Pd., Drs. Rustam Effendy,
Drs. Dadan Supriatna, Drs. Tatang Somantri, Endang Suhana, S.Pd, Iksan, S.Pd.
Illustrator: Endang Djumaryana; **Fotografer:** Parwoto; **Distributor:** Hanat.

Penerbit/Pencetak:

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) JAYAGIRI BANDUNG
Jl. Jayagiri No. 63 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Kode Pos 40391
Telepon (022) 2786017, Fax. (022) 2787474

DIPRODUKSI DAN DIEDARKAN TERBATAS DALAM KALANGAN SENDIRI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Tahun 1999/2000



GITASETRA

Pengantar

Salam jumpa pembaca setia Gita Setra.

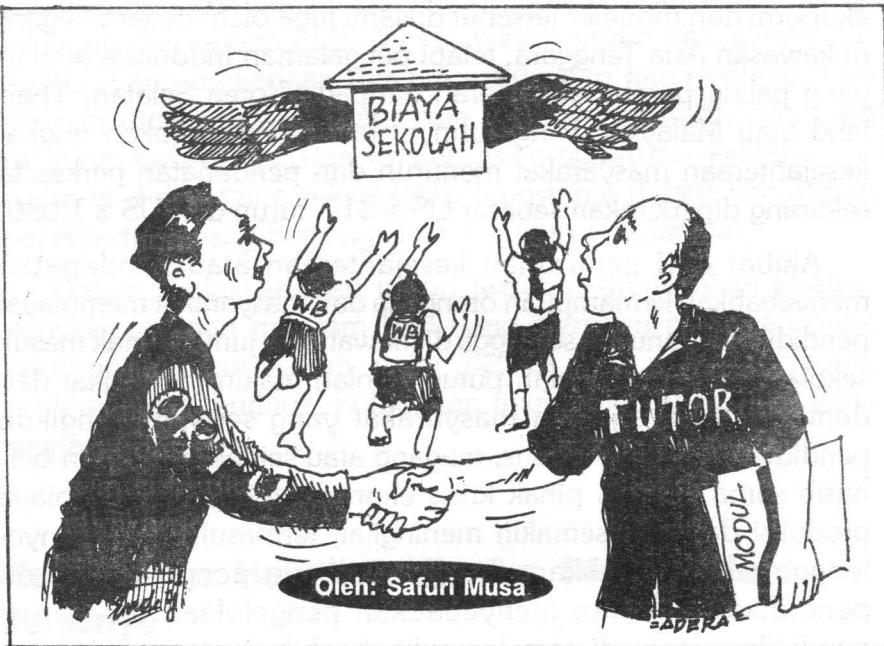
Bulletin kita hadir pada abad milenium yang merupakan permulaan abad 21. Banyak yang akan berubah pada abad ini, tak terkecuali dengan tatanan pemerintahan kita yang senantiasa disempurnakan baik organisasi maupun mekanismenya. Hal ini bertujuan antara lain adalah agar penyelenggaraan pemerintahan efektif dan efisien. Satu yang saat ini mulai bergulir dan masih banyak kalangan yang memperdebatkan operasionalisasinya di lapangan yaitu Otonomi Daerah. Bagaimana dengan Anda? Siapkah kita menghadapinya? Bagaimanapun kita harus mengerahkan segenap kemampuan menjalannya.

Pembaca yang budiman.

Satu kunci kesiapan menghadapi berbagai macam perubahan yang sedang terjadi adalah jangan sampai Anda ketinggalan informasi. Apabila kita miskin informasi tentulah kita akan kalah bersaing menghadapai tantangan dan masalah yang siap menghadang jalan kita. Oleh karena itu bulletin Gita Setra akan senantiasa hadir membantu Anda. Kali ini kami tampilkan artikel berjudul Konsep dan Strategi Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ditulis oleh Sdr. Safuri Musa, Menyongsong Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan SKB ditulis oleh Sdr. Edi Kusmaya, Globalisasi dan Dampaknya pada Tatanan Keluarga buah karya Sdr. Sri Wahyuningsih. Akhirnya walau pun agak terlambat kami segenap Redaksi Bulletin Gita Setra dan seluruh Keluarga Besar BPKB Jayagiri mengucapkan Selamat Tahun Baru 2000 dan Selamat Iedul Fitri 1 Syawal 1420 H Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir Bathin. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin oleh Allah SWT dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian hidup. Amin

Redaksi.

Konsep dan Strategi
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan



Pengantar

 agam dan dimensi program PLS yang demikian luas jangkauan pelayanannya sesungguhnya sangat berpretensi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, asalkan program-program yang diluncurkannya tersebut adalah fungsional dan seiring dengan nilai-nilai religi, sosial, budaya dan psikologis yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Masalah kemiskinan di Indonesia nampaknya makin kompleks, karena tidak hanya berkenaan dengan masalah *welfare* atau ekonomi semata, tetapi juga *poverty* atau budaya dan struktural. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia semakin menambah parahnya tingkat kemiskinan. Walaupun krisis ekonomi dan moneter tersebut dialami juga oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi pengalaman Indonesia adalah yang paling parah, lebih parah daripada Korea Selatan, Thailand atau Malaysia. Pengaruhnya, telah menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dan pendapatan perkapita sekarang diperkirakan sebesar US \$ 317, turun dari US \$ 1.080.

Akibat dari penurunan kesejahteraan atau pendapatan menyebabkan kemampuan orang tua dan masyarakat membiayai pendidikan menurun, sehingga dikhawatirkan jumlah anak masuk sekolah menurun, jumlah putus sekolah makin meningkat dan demikian juga anggota masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan, latihan, kursus, magang atau sejenisnya akan bernasib sama. Di lain pihak krisis ekonomi menyebabkan biaya produksi dan jasa semakin meningkat, termasuk biaya penyelenggaraan pendidikan. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan ini akan menyebabkan pengelolaan pelayanan pendidikan menjadi semakin sulit. Apabila ini terus berlanjut, maka akan sangat berdampak pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Tulisan ini mencoba mengangkat tentang '*Konsep dan Strategi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*'. Sebelum pada uraian itu penulis paparkan terlebih dahulu beberapa konsep tentang kemiskinan dan kebijaksanaan yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya penulis soroti tentang peran Ditjen Diklusepora Depdiknas, termasuk didalamnya adalah peran SKB dan BPKB yang bertanggung jawab dalam membina pelaksanaan program-program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) khususnya yang berkenaan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Peran strategis ini dapat ditinjau dari tiga segi, yakni (1) luasnya garapan program dan satuan PLS, (2) keluwesan sistem penyelenggarannya, yang berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan dan cara penilaian hasil belajar, dan (3) dampak program dan keluarannya (peserta didik) yang relatif lebih fungsional dalam kehidupan peserta didik yang bersangkutan maupun masyarakat.

Dalam melaksanakan peran tersebut dibutuhkan strategi penyelenggaraan program PLS yang memberi perhatian pada kelompok lapisan bawah, yaitu mereka yang secara ekonomi, struktur sosial, budaya, politik dan tingkat pendidikannya yang termarginalisasi.

Kemiskinan: Hakekat, Ukuran, Dimensi dan Jenisnya



Krar Nusa Bhakti (1998) menyatakan bahwa krisis ekonomi dan keuangan berdampak terhadap keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan negara (*state security*), keamanan nasional (*national security*) dan keamanan masyarakat (*societal security*) bahkan keamanan regional (*regional security*). Walaupun pada mulanya dipicu krisis moneter, kemudian krisis ekonomi, tetapi pada akhirnya berdimensi luas sampai pada krisis kepercayaan

pada pemerintah, dan runtuhnya Suharto dari kursi kepresidenan.

Memang sungguh ironis, negara Indonesia yang dulu dijuluki sebagai jamrut di khatulistiwa kini sudah dua tahun lebih terhempas oleh badi krisis moneter dan ekonomi. Hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dan dibanggakan selama orde baru seolah-olah tanpa daya menahan terpaan badi tadi. Dampak krisis moneter dan ekonomi telah mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh karena pabrik-pabrik dan sektor industri swasta banyak yang gulung tikar, investor-investor asing menarik kembali modalnya, peluang kerja makin sempit, daya beli masyarakat menurun akibat menurunnya pendapatan, dan berbagai sendi kehidupan mengalami kemerosotan. Ujung-ujungnya meningkatnya tingkat kemiskinan.

Upaya pengentasan penduduk miskin pada saat ini jauh lebih sukar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. **Tjiptoherijanto** (1997) menganalogikan dengan tahapan transisi kesehatan, maka tahap pengentasan kemiskinan pada saat ini sudah mulai memasuki tahap '*hard core*'. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan tidak semata-mata pada kebijakan ekonomi makro, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan ekonomi mikro berupa terobosan-terobosan yang langsung memberikan pengaruh pada peningkatan produktifitas golongan miskin. Atau dengan kata lain kita berikan ikan sekaligus kita ajari mereka bagaimana cara membuat kailnya.

Apabila kemiskinan tidak secara sistematis kita tanggulangi, maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dan akan semakin terpuruk dalam menghadapi era globalisasi. Unicef (1997) menegaskan tiga pilar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni (1) pendidikan, (2) ekonomi dan (3) kesehatan. Dalam kaitan ini kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan masyarakat

dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dan pengembangan ekonomi. Pada ketiga pilar itu PLS dapat menjalankan perannya. Disini peran PLS tidak semata-mata kepada peran kependidikan, tetapi juga masuk pada upaya penyadaran akan arti pentingnya kesehatan dan upaya pengembangan mikro ekonomi.

● Hakekat Kemiskinan

Kemiskinan diasumsikan sebagai fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber. Dengan asumsi ini, maka penanganan kemiskinan cenderung mengedepankan pada *welfare strategy* dengan memberikan sejumlah program-program yang bersifat sementara. Kegagalan memahami dan menghayati kemiskinan akan melahirkan kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan yang salah atau program yang tidak efektif. Berkaitan dengan hal itu Moeljarto (1993) mengemukakan enam alasan mengapa masalah kemiskinan bukan hanya masalah *welfare*, tetapi *poverty*.

1. Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan (*vulnerability*) pada sebagian besar penduduk.
2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja.
3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat
4. Kemiskinan berarti menghabiskan semua atau sebagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas.
5. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya resiko ketergantungan, karena besarnya keluarga.
6. Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

④ Ukuran Kemiskinan

Para ahli atau lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang pembangunan sosial tidak ada keseragaman dalam melakukan pengukuran kemiskinan. Berikut ini beberapa pandangan mengenai ukuran kemiskinan.

1. **Alfian, Mely G.Tan dan Selo Soemardjan** (YIIS, 1980) mengemukakan ada dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu *kemiskinan absolut* dan *kemiskinan relatif*. *Kemiskinan absolut* adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan *kemiskinan relatif* adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan demikian karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antara lapisan sosial.
2. Bank Dunia menetapkan bahwa garis kemiskinan adalah US \$ 50 perkapita/tahun untuk daerah perdesaan dan US \$ 75 perkapita/tahun untuk daerah perkotaan. Perbedaan garis batas ini berkaitan dengan biaya hidup diantara kedua wilayah itu.
3. **Sajogyo**, dalam **Vidyandika** (1994) mengusulkan cara pengukuran kemiskinan
Dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang miskin.
 - a) golongan paling miskin, dan mempunyai pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240 kg atau kurang,
 - b) golongan miskin sekali, yang memiliki pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240 kg hingga 360 kg,

- c) golongan miskin, yang memiliki pendapatan perkapita pertahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg.
4. Biro Pusat Statistik memberikan alternatif untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari. Badan ini mengusulkan bahwa setiap orang minimum harus memenuhi 2.100 kalori setiap harinya, jadi 2.100 kalori merupakan batas garis kemiskinan. Selain itu BPS juga memperhitungkan kebutuhan non pangan, seperti kebutuhan perumahan, penerangan, air, sandang dan jasa. Tetapi kriteria itu selalu diperbarui sesuai tingkat inflasi yang terjadi. Dengan perubahan itu mengakibatkan pula perubahan garis kemiskinan.

Paparan itu menunjukkan bahwa ukuran-ukuran obyektif kemiskinan itu sangat bervariasi sehingga harus hati-hati dan kritis mencermatinya. Selain itu ukuran-ukuran yang digunakan banyak mendapat kritik karena lebih menekankan pada aspek ekonomi, sedangkan pada kenyataannya kebutuhan manusia sangat bervariasi sehingga setiap upaya penentuan garis kemiskinan yang direduksi dalam aspek ekonomi tidak mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya, **Harold Watts** (1969) dalam **Vidyandika** (1994). Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam yang juga berkaitan dengan dimensi politis, kebudayaan dan sosial. Sehingga kemiskinan tidak hanya berdimensi tunggal, yakni persoalan ekonomi semata, tetapi perlu memperhatikan dimensi-dimensi lainnya.

④ Dimensi-dimensi Kemiskinan

Masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi bersifat multi dimensional

karena pada kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya dan politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (*material well-being*), tetapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk menggapai seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif. Namun untuk mengetahui berapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang, ukurannya relatif dan sangat kualitatif. Dalam kaitan ini **Ellis** (1984) dalam **Vidyandika** (1994) mengemukakan bahwa yang dipersoalkan bukan berapa ukurannya, tetapi dimensi-dimensi apa saja yang menyertai kemiskinan itu.

1. Dimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang dan perumahan. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah atau dolar meskipun harganya akan selalu berubah-ubah yang tergantung tingkat inflasi.
2. Dimensi sosial atau budaya. Dimensi ukurannya lebih bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup mereka. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembagaanya nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistis, ketidakberdayaan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam pengentasan kemiskinan harus juga meliputi budaya tersebut. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomi juga sulit untuk ditanggulangi.
3. Dimensi struktural atau politik. Dimensi ini menunjukkan bahwa seseorang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya mengalami kemiskinan struktural dan politis.

Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Mencermati ketiga dimensi kemiskinan tersebut penulis melihat bahwa dalam pengentasan kemiskinan tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan juga menyangkut budaya dan struktural. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomi juga sulit untuk ditanggulangi. Demikian juga apabila kondisi struktural dan politis tidak dibendung, maka akan sulit pula mengatasi kemiskinan ekonomi. Hal ini akan berimplikasi terhadap strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikehendaki bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya.

• Jenis-Jenis Kemiskinan

Para ahli berbeda-beda pula dalam mengelompokkan jenis-jenis kemiskinan. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN, mengelompokkan kemiskinan ke dalam empat golongan.

1. *Kemiskinan ekonomi*, yaitu kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
2. *Kemiskinan politik*, menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (power).
3. *Kemiskinan relatif*, adalah keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kebutuhan saat itu.
4. *Kemiskinan sosial*, dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat.

Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan



ebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan sosial di Indonesia (baca: pendidikan, sosial, kesehatan) termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, sesungguhnya telah ditempuh sejak Pelita I. Hanya saja dalam perkembangannya ada pergeseran kebijaksanaan dan strategi dalam pengentasan kemiskinan. Terjadinya pergeseran ini tidak terlepas dari adanya perubahan kontekstual maupun kemajuan tahapan pembangunan itu sendiri.

Pada tahapan awal dan selama PJP I strategi pengentasan kemiskinan merupakan *appendage* dari upaya untuk mempertahankan pertumbuhan setinggi-tingginya. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijaksanaan pengentasan kemiskinan yang diambil selama itu:

1. pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan;
2. pengembangan kelembagaan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan seperti Program Pengembangan Wilayah (PPW), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4KT);
3. perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat kecil (Kupedes, KCK, BKK);
4. peningkatan akses kaum miskin kepada berbagai pelayanan sosial, seperti pendidikan, air bersih, keluarga berencana;
5. penransferan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke berbagai daerah dalam bentuk Inpres untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah.

Upaya pengentasan kemiskinan tersebut secara bertahap nampak hasilnya, tetapi secara keseluruhan hasil-hasil pembangunan nasional lebih banyak dinikmati oleh lapisan atas. Bahkan beberapa orang kritisus ekonomi seperti **Vidyandika** (1994) dan **Sonia Prabowo** (1997) dan **Arif Satria** (1997)

menyatakan bahwa adanya kecenderungan perubahan kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan ternyata telah mewujudkan konteks yang lebih baik bagi pertumbuhan konglomerat, yang justru menimbulkan pengaruh yang makin terbatas bagi kaum miskin.

Para eliten pemerintahan Orde Baru nampaknya telah banyak diilhami oleh ide paradigma modernisasi yang mengandalkan tetesan strategi pertumbuhan (*growt*) ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu asumsi paradigma pertumbuhan adalah perlunya investasi kepitas besar-besaran pada perusahaan industri modern dan aplikasi teknologi modern pada produksi. Terciptanya sektor industri yang dinamis melalui investasi tidak hanya membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya serta menyerap surplus tenaga kerja perdesaan yang subsisten ke sektor modern. Secara tidak langsung akan terjadi peningkatan penghasilan dari banyak orang. Dengan peningkatan penghasilan sehingga diharapkan keluarga akan mendapat sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya.

Kebijakan yang lebih mengandalkan *tetesan strategi pertumbuhan*, sepenuhnya tidak mengandung kebenaran, karena meskipun banyak negara berkembang telah berhasil mengalami peningkatan dalam rangka pertumbuhannya, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti oleh perbaikan nasib kaum miskin. Hal ini terungkap hasil studi komparatif terhadap 74 negara yang dilakukan **Adelman** dan **Moris**, dalam **Vidyandika** dan **Sonia Prabowo** (1997). Studi itu menegaskan bahwa kenaikan GNP ternyata ada kecenderungan penurunan proporsi relatif pendapatan nasional yang diterima oleh bagian penduduk termiskin (*the poorest 60 per cent*). Mereka sampai pada suatu kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi hanya ‘menyakiti’ yang miskin daripada membantu mereka.

Sejalan dengan pendapat di atas dikemukakan oleh **Todaro** (1994) dan **Griffin** (1981) yang mempertanyakan kembali efektifitas teori pertumbuhan, karena melegitimasi *growth* berarti anti pembangunan, karena menciptakan *opportunistic myth* yang dirancang untuk mengabadikan kepentingan pribadi dan melanggengkan status quo dari elite politik serta mengorbankan rakyat banyak. *Dalam growth menciptakan blokade dalam sistem ekonomi yang meliputi struktur sosial dan kebijakan*, misalnya kebijakan yang urban bias.

Esensi paradigma pertumbuhan (*growth*), menurut **Ramos** (1975) dalam bukunya “*Theory of Organizational Delimitations*” menempatkan manusia sebagai pemaksimuman manfaat (utility maximizer). Dominasi manusia menumbuhkan enclave pasar. Secara tidak langsung, proses unidimensionalisasi terjadi karena manusia menjadi mahluk yang hanya peka terhadap rangsangan-rangsangan yang ditumbuhkan oleh mekanisme pasar. Upaya mengeluarkan manusia dari *enclave pasar* ini adalah menciptakan suatu model tata kehidupan masyarakat yang disebut *isonomy*. Dalam masyarakat *isonomy*, pasar hanya menjadi salah satu enclave dalam realitas sosial yang bersifat multi-sentrik. *Isonomy mendorong manusia sebagai mahluk yang selalu mengatur eksistensinya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya untuk mengaktualisasikan diri*. Manusia tidak perlu mencari konformitas dengan enclave pasar. Dia dapat mengambil kegiatan dalam enclave lainnya, karena otoritas di dalam masyarakat *isonomy* bersifat luwes. Titik tekan pada pengakuan humanistik ini pemicu munculnya konsep pembangunan sosial.

Kebijakan pemerintah Indonesia mulai mengacu pada peningkatan kualitas manusia terutama masyarakat pada lapisan bawah, setelah disadari bahwa terdapat kelemahan dari paradigma pertumbuhan yang mempunyai *economic bias*. Upaya di atas secara tidak langsung melahirkan konsep pembangunan sosial yang dijiwai paradigma kebutuhan dasar.

Sebagai koreksi terhadap paradigma pertumbuhan muncul pemikiran bahwa pertumbuhan harus beriringan dengan pembagian hasil-hasil pembangunan secara lebih merata. Strategi demikian dikenal dengan redistribution with growth, yang diyakini akan menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri. **Gunawan Sumodiningrat** (1995) mengemukakan bahwa strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan pada dasarnya mempunyai tiga arah:

1. pemihakan dan pemberdayaan masyarakat,
2. pemberian otonomi dan pendeklasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah,
3. penajaman dan pemantapan arah dalam struktur sosial ekonomi masyarakat.

Dengan pengalaman yang panjang tentang kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan diluncurkan program IDT yang diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan jumlah desa/kelurahan tertinggal. Selain itu program IDT dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan memadukan berbagai program pembangunan yang sudah ada dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Pada tingkat kelompok sasaran, program IDT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perubahan struktur masyarakat dan membangun kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan kondisi sosial ekonomi. Dalam program IDT terdapat tiga komponen masukan yaitu (1) dana bergulir sebagai bantuan modal usaha, (2) prasarana perdesaan dan (3) sarana pendampingan tenaga teknis di lapangan.

Sebagai suatu gerakan nasional, program IDT merupakan peluang yang amat tepat bagi berbagai pihak untuk memberikan dukungan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dan apabila dilihat sebagai suatu strategi mengandung moral

pembangunan, bahwa pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, adanya pemihakan kepada penduduk miskin serta terselenggaranya koordinasi program pembangunan prasarana dan sarana yang diarahkan untuk membuka keterisolasian, dan meningkatkan peran serta produktifitas rakyat dalam kegiatan sosial ekonomi. Dengan demikian program IDT adalah upaya *pembangunan moral* melalui peningkatan kesadaran, kemauan, *rasa tanggungjawab*, *rasa kebersamaan*, *harga diri*, dan *percaya diri masyarakat*. Sedangkan aparatur pemerintah diharapkan semakin peka, peduli dan tanggap terhadap permasalahan pembangunan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Keberhasilan program IDT dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat ditentukan oleh adanya kepedulian aktif seluruh masyarakat ,motivasi penduduk miskin itu sendiri untuk mengubah nasibnya, dukungan aparat perencana dan pelaksana yang penuh dedikasi dalam penanggulangan kemiskinan, dan peran serta aktif berbagai pihak baik perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan,pers maupun unsur masyarakat lain yang mendorong dan menunjang keberhasilan program.

Strategi PLS Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan



Ita telah mafhum bahwa krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis nasional, menuntut dilakukannya perbaikan dan pembenahan disegala aspek kehidupan. Beberapa pakar menyebutnya sebagai krisis budaya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Jika demikian, maka peranan pendidikan sangat penting dalam menanggulangi akibat krisis

karena pendidikan selain proses mendidik juga merupakan proses membudayakan manusia.

Implikasi krisis nasional tadi mendorong adanya perbaikan, perubahan dan pembenahan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dalam konteks kekinian disebut sebagai "reformasi". Secara umum arah reformasi adalah menuju ke masyarakat madani. Adapun implikasi dari krisis nasional terhadap tuntutan reformasi pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihhan aktivitas usaha nasional.
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak azai manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental, dan
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama, sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Mengacu hasil Konferensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis-Menuju Pembaruan (1999), telah dirumuskan visi, misi, tujuan, kebijaksanaan dan strategi pendidikan nasional. Rumusan dasar ini disusun para peserta konferensi dengan memperhatikan beberapa parameter, yaitu (1) faktor eksternal, yaitu gelombang globalisasi, kemajuan iptek dan kehidupan yang semakin kompetitif dan (2) faktor internal, yaitu krisis budaya yang mengakibatkan krisis, termasuk wawasan atau pola pikir sumber

daya manusia, organisasi dan proses kerja organisasi, perundang-undangan, maupun sarana lainnya: potensi SDM yang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dan budaya hidup bangsa yang religius.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan kebijaksanaan nasional yang dirumuskan dalam Konferensi Pendidikan Indonesia tersebut, dirumuskan mengenai strategi pendidikan dalam mengatasi dampak krisis, dan khususnya upaya pengentasan kemiskinan.

- a. *Strategi dalam peningkatan efektifitas program jaring pengaman sosial.*

Dengan meningkatkan kualitas pelaksanaannya, bantuan dana agar lebih diprioritaskan pada kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan serta bantuan pendidikan yang lebih diprioritaskan pada peserta didik dari orang tua yang tidak mampu.

- b. *Strategi untuk meningkatkan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.* Perluasan jangkauan pelayanan antar tingkat, golongan, usia dan jalur pendidikan, serta dengan memberi perhatian pada pendidikan anak dini usia dan kelompok lanjut usia.

- c. *Strategi untuk meningkatkan relevansi pendidikan.*

Pengetahuan dan keterampilan peserta didik hendaknya terus dikembangkan sesuai dunia kerja yang selalu berubah dan pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi ekonomi koperasi, kerakyatan dan sektor informal.

- d. *Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas proses pendidikan.* Peningkatan kualitas lulusan harus diupayakan melalui pengembangan satuan acara pembelajaran yang lebih operasional, peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan

tenaga kependidikan dan keterlibatan masyarakat dalam keputusan kebijaksanaan operasional.

- e. *Strategi untuk meningkatkan profesionalisme pendidikan.*
Strategi yang ditempuh antara lain menerapkan standar kualifikasi tenaga kependidikan, pengembangan re-training, pendidikan pra-jabatan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan.
- f. *Strategi untuk meningkatkan efisiensi.*
Optimalisasi sumber-sumber dana yang semakin terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan profesionalisme pengelola dalam menerapkan manajemen yang efektif.
- g. *Strategi untuk mengurangi uniformitas.*
Dalam penyelenggaraan pendidikan agar lebih mengdepankan kebhinekaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas pengelola pendidikan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal serta mengadakan sarana dan perlengkapan pendidikan yang sesuai dengan spesifikasi dan keunggulan masing-masing.
- h. *Strategi untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.*
Dalam penyelenggaraan pendidikan dasar peran pemerintah masih diperlukan, sebaliknya pada pendidikan menengah dan tinggi perlu terus ditumbuhkan peran serta orangtua dan masyarakat.
- i. *Strategi untuk mengurangi dominasi birokrasi.*
Antara lain dengan melakukan desentralisasi pengelolaan kewenangan pengambilan keputusan dan restrukturisasi organisasi dan otonomisasi.

Program-program PLS Yang Berpihak Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan



Analisis kemiskinan secara geografis dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan /BKKBN pada tahun 1996, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia tinggal di pulau Jawa-Bali atau sekitar 56,61 %, sedangkan di luar Jawa-Bali sebesar 43,39 %. Apabila dihitung secara keseluruhan diperoleh data bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Tingginya jumlah kemiskinan di daerah perdesaan ini berkaitan erat dengan pola mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk di daerah perdesaan, khususnya pertanian yang memiliki lahan pertanian yang sempit (petani gurem) dan para buruh tani.

Selanjutnya apabila dilihat tingkat kesenjangan pendapatan golongan kaya dan miskin menunjukkan gambaran yang lebih buruk lagi. Perbedaan kekayaan sangat mencolok antara si kaya dan si miskin terutama di Jawa. Demikian pula kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan lebih buruk daripada di pedesaan, walaupun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih sedikit daripada di pedesaan. Kondisi yang demikian menurut Tjiptoherijanto (1996) dilukiskannya sebagai keadaan yang *low inequality*, artinya apabila 40 % dari penduduk berpenghasilan rendah menerima 17 % atau lebih dari pendapatan nasional secara keseluruhan. Karena pendapat yang dikemukakan tersebut tahun 1996, maka kemungkinannya akan meningkat sebagai akibat krisis, yakni dapat menjadi dalam kategori *high inequality*, dimana 40 % penduduk yang berpenghasilan rendah hanya menerima kurang dari 12 % dari seluruh pendapatan nasional.

Gambaran kondisi kemiskinan yang ditampilkan negeri ini sepatutnya menjadi catatan pekerjaan yang panjang bagi segenap aparat pemerintah, birokrat, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat

dan masyarakat itu sendiri untuk memecahkannya. Salah satu kebijakan dan upaya yang ditempuh bagi pemecahan masalah tersebut adalah dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah (PLS).

Menyimak paparan bagian II. Kebijakan dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, menyimpulkan adanya pergeseran paradigma yang semula hanya mengedepankan pertumbuhan ke arah paradigma yang memberikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan dengan perhatian pada kelompok lapisan bawah/ penduduk miskin. Dalam kaitan ini kebijaksanaan dan program Ditjen Diklusepora hendaknya berpihak pada pengembangan program dan perluasan jangkauan pelayanannya bagi kelompok lapisan bawah. Program-program yang dirancang pun harus disesuaikan dengan penanganan kebutuhan yang mendesak, yakni pemberian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang secara fungsional dapat meningkatkan produktifitas dan peningkatan pendapatan, yang dilakukan dengan berbagai pendidikan, latihan, kursus, magang dan kelompok-kelompok belajar dan satuan PLS sejenis.

Keluwesan PLS yang berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan dan cara penilaian hasil belajar sangat berpeluang memainkan perannya lebih besar dalam ikut serta mengentaskan kemiskinan. **Napitupulu** (1999) dalam Semiloka Nasional Efektifitas Program PLS terhadap Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan di Lembang, menegaskan perlunya meningkatkan pendidikan berkelanjutan (continuing education) sebagai peran PLS dalam memberikan alternatif pengentasan kemiskinan. Terdapat 6 (enam) program pendidikan berkelanjutan yang diajukan oleh UNESCO-PROAP Bangkok dalam rangka APPEAL (Asia-Pacific Programme of Education for All).

1. Program keaksaraan.
2. Program kesetaraan.
3. Program peningkatan pendapatan.
4. Program peningkatan kualitas hidup.
5. Program pengembangan minat pribadi.
6. Program berorientasi masa depan.

Selanjutnya agar program-program PLS dapat berlangsung dengan mangkus (efektif) Napitupulu (1999) kembali menegaskan perlunya kesesuaian program tersebut dengan perkembangan sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-budaya yang merupakan matra-matra atau dimensi-dimensi kehidupan manusia. Program PLS yang mangkus adalah yang memberdayakan (*empowerment*) warga belajar, menjadikan mereka warga negara yang mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memecahkannya, warga negara penemu masalah (*problem-finder*) dan pemecahan masalah (*problem-solver*).

Keluwesan dan keluasan jangkauan PLS melahirkan konsep pendidikan sepanjang hayat, yang oleh **Napitupulu** (1999) perlu memperhatikan *empat sendi atau pilar yang harus ditanamkan kepada para peserta didik dan tenaga kependidikan*, yaitu (1) belajar mengetahui, (2) belajar berbuat, (3) belajar hidup bersama, hidup dengan orang lain dan (4) belajar menjadi seseorang.

Oleh karena persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi menyangkut juga budaya, maka program-program Ditjen Diklusepora yang diemban pakar hendaknya turut mengikis budaya miskin, seperti apatis, apolitis, fatalistik dan ketidakberdayaan. Selain arah dan programnya fungsional, juga dalam pelaksanaan metode pembelajarannya hendaknya melibatkan secara aktif peserta didik (warga belajar), yang secara tidak langsung menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri dan

potensi diri mereka. Dalam kaitan ini agar peserta didik dapat berkembang inisiatifnya ,maka pendekatan pembelajarannya pun yang mampu memberdayakan peserta didik sesuai karakteristik dan budayanya. Salah satu konsep pembelajaran PLS yang ditawarkan **Santoso S. Hamidjojo** (1999) adalah konsep belajar sendiri (*self learning concept*) dengan prinsip-prinsip :

1. bebas tempat dan waktu, sesuai kebutuhan peserta didik,
2. bebas menentukan fasilitator,
3. bebas dari aturan formal,
4. bebas belajar,
5. belajar dengan cepat, mudah dan fungsional.

Dengan mencermati perkembangan PLS dewasa ini **Santoso S.Hamidjojo** (1999) memberikan arahan strategis (*strategic direction*) agar dapat secara nyata memberikan dukungan bagi upaya pengentasan kemiskinan.

1. Memperkaya iklim/lingkungan yang mendidik, satu learning environment yang cukup menjanjikan bagi upaya pemberantasan kemiskinan dan kesengsaraan.
2. Memperkuat dan memanfaatkan secara bersama sistem peluncuran (delivery system) demi efisiensi dan efektifitas sebesar-besarnya.
3. Memperbanyak ragam aktivitas pelatihan yang terorganisasi secara rapih untuk kemudian menciptakan pelembagaan yang kokoh.
4. Membangun jaring aksi sosial (JAS) dan memanfaatkannya secara optimal untuk menggalang PLS yang langgeng karena mendapat dukungan dan digerakkan sendiri oleh masyarakat.
5. Membangun sistem informasi manajemen (SIM) dan menggunakan secara efektif untuk mengantisipasi dan meresponsi persyaratan-persyaratan tuntutan keterampilan dan pengetahuan serta pasaran keterampilan (skill market).
6. Merancang-bangun organisasi PLS supaya menjadi satu organisasi pembelajaran yang tangguh dan canggih, yang

pada gilirannya mampu memperkuat dan menyegarkan kemampuan tenaga-tenaga pelaksana, pengelola dan pemimpin.

7. Memberdayakan PLS itu sendiri supaya PLS mampu memberdayakan khalayak, masyarakat dan warga negara, sehingga secara bertahap mampu memberantas sendiri kemiskinan dan kesengsaraan.

Sesungguhnya upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya monopoli pemerintah dengan berbagai sektornya, tetapi pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri pun harus dilibatkan. Keterlibatan ini tidak sekedar dilihat dari dukungan finansial semata, tetapi kesadaran untuk bangkit memecahkan persoalan bersama.

Kesimpulan

1. Kebijaksanaan dan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang menggunakan *paradigma pertumbuhan* (*growth*) atau *tetesan strategi pertumbuhan*, sepenuhnya tidak mengandung kebenaran karena hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan atas (*economic bias*). Salah satu strategi yang dianggap lebih menjamin keadilan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan lapisan bawah adalah *strategi redistribution growth*, yaitu strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.
2. Dengan mencermati kompleksnya masalah kemiskinan, peran Ditjen Diklusepora Depdiknas, termasuk di dalamnya SKB dan BPKB adalah strategis. Oleh karena masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi menyangkut masalah sosial, politik dan budaya yang tidak lain proses edukasi. ■

Menyongsong Otonomi Daerah

PELUANG dan TANTANGAN SKB

DUET



PENGANTAR

untutan Otonomi Daerah (OTDA) di tingkat II pasca reformasi semakin gencar dan tampaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Banyak hal mendasar yang akan berubah jika OTDA sepenuhnya dilaksanakan. Antara lain porsi daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di semua sektor, akan sangat dominan. Termasuk dalam aspek pendidikan. Kenyataan tersebut, merupakan peluang sekaligus tantangan.

PENTINGNYA KUALITAS SDM DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH



alah satu persyaratan agar OTDA dapat berjalan optimal, adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM-nya). Tanpa persiapan SDM, meskipun infrastruktur fisik dibangun sedemikian rupa, tidak akan banyak memberikan arti.

Disinilah kontribusi pendidikan dalam upaya meningkatkan SDM dengan berorientasi pada potensi kekhasan daerah. Keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (Diklusepora) di tingkat kabupaten/kotamadya akan semakin strategis.

Sebab, salah satu prinsip penyelenggaraan SKB selalu berorientasi kepada kebutuhan belajar masyarakat, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Jadi pendekatan dari bawah (bottom up planning), seperti sering didengungkan sebagai paradigma baru di era reformasi, sebenarnya merupakan hal lama di dunia Pendidikan Luar Sekolah (PLS), termasuk di dalamnya program-program yang diselenggarakan SKB.

Di sisi lain sebagai salah satu institusi, sudah seharusnya Pemda setempat lebih memberdayakan SKB. Di samping SKB sendiri harus lebih pro aktif lagi dalam menjalin pendekatan dengan Pemda setempat, dan kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya. Sebab, berdasarkan pengamatan sementara, belum semua SKB mampu berduet dengan Pemda dalam upaya mengembangkan kualitas SDM.

SOSIALISASI KEBERADAAN SKB



ayang, keberadaan SKB belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan di lingkungan Depdiknas sendiri, masih banyak yang belum mengetahui apa itu SKB. Apalagi di lingkungan luar Depdiknas. Jangan heran, jika dibeberapa kabupaten tidak sedikit Bupati yang belum tahu keberadaan SKB di wilayah kerjanya. Logikanya, bagaimana SKB dapat berkembang sesuai tuntutan OTDA, jika pimpinan daerahnya saja belum kenal.

Kenyataan tersebut di atas, diakibatkan oleh beberapa faktor. Antara lain: *pertama*, program Diklusepora dari tingkat pusat sampai daerah kurang promosi. Sehingga belum populer, meskipun kegiatannya relatif banyak dan sudah sejak lama ada di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, promosi dan sosialisasi sudah saatnya dijadikan salah satu program yang tidak terpisahkan dengan kegiatan secara keseluruhan. Promosi yang paling jitu, antara lain melalui ekspos kegiatan. Untuk itu kerja sama dengan media massa, baik cetak maupun elektronik, perlu lebih ditingkatkan. *Kedua*, penggunaan nama "Sanggar" telah menyempitkan arti SKB sendiri sebagai satu institusi Diklusepora. Akibatnya tidak sedikit orang yang menggambarkan SKB, hanyalah sebuah tempat belajar tari-tarian. Seperti nama sanggar senam, sanggar seni, dan nama sanggar lainnya yang sering digunakan masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan nama yang betul-betul menggambarkan kegiatan SKB secara utuh dan mudah diingat oleh masyarakat, sebaiknya dipercepat.

Arti sebuah nama penting. Sebab nama akan memberikan gambaran dan motivasi bagi suatu institusi seperti SKB.

ORIENTASI PROGRAM SKB



enyongsong OTDA, dalam penyusunan program SKB mesti lebih memunculkan karakteristik daerah. Oleh sebab itu, dasar pijakan program salah satunya harus mengacu pada kebijakan umum pembangunan daerah yang bersangkutan, khususnya dalam aspek Diklusepora. Ini artinya, SKB tidak bisa membuat rencana dan parameter program sendiri.

Oleh sebab itu aturan main penyusunan program yang sistemnya sudah baku, dalam tahap pelaksanaan perlu dipertajam lagi. Di masa datang, diharapkan tidak ada cerita yang menyusun program tahunan, hanya dikerjakan oleh Kepala SKB. Selain tidak sesuai dengan aturan main, bagaimana mungkin program tersebut mampu mengakomodir sekaligus menjabarkan karakteristik umum daerah.



Untuk menunjang kondisi itu, perlu pembinaan manajemen yang lebih menggigit. Terutama dalam mengikis habis secara bertahap pola pikir, pola kerja dan moralitas *ala Orde Baru* dalam

diri setiap personil terutama Kepala SKB sebagai *leader*. Seperti sikap tertutup masalah penggunaan anggaran dengan sikap lebih terbuka, dan manajemen *tukang cukur* diganti manajemen berdasarkan sasaran, serta pandangan yang menganggap bahwa staf terutama Pamong Belajar (PB) sebagai oposisi, kini saatnya mesti dilihat sebagai *partner*.

MEWUJUDKAN KREATIFITAS YANG PRIMA



anpa kreatifitas seluruh komponen, SKB tak akan mampu mengimbangi derap dan tuntutan OTDA. Salah satunya PB sebagai motor penggerak kegiatan. Dan biasanya, motivasi berprestasi mereka akan terpacu, jika pimpinannya mampu menggali dan mengembangkan potensi tersebut.

Lagi-lagi pimpinan akan diuji sampai sebera jauh kemampuan manajerialnya. Dalam kondisi psikologis seperti sekarang, tampaknya pimpinan sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan ala Orde Baru, yang lebih menekankan pada formalitas dan instruksi. Namun harus menggunakan pendekatan yang demokratis, melalui dialog, keterbukaan, dan suri tauladan. Kalau tidak, jangan harap akan dihargai oleh stafnya sendiri.

Mewujudkan kreatifitas yang prima pada semua staf merupakan tuntutan yang tak terelakan apabila SKB mau eksis dalam menyelenggarakan programnya dan dalam menghadapi otonomi daerah.

Jadi kebutuhan pelatihan adalah, beda antara pengetahuan/keterampilan yang seharusnya dimiliki, dikurangi dengan pengetahuan/keterampilan yang sudah dimiliki. ■

Globalisasi dan Dampaknya pada Tatanan Keluarga

Oleh: Sri Wahyuningsih



lobalisasi merupakan suatu era kehidupan manusia yang berpandangan bahwa kehidupan manusia harus bertumpu kepada penonjolan penerapan hak-hak azasi manusia. Manusia harus dapat hidup dalam dunianya. Oleh karena itu manusia perlu menyesuaikan diri pada perkembangan IPTEK yang paling mutakhir. Di dalam era globalisasi dengan kemajuan alat telekomunikasinya, harus menyesuaikan diri dan mampu meng"uber" informasi mutakhir yang diperlukan untuk bidang kerjanya masing-masing. Kalau

tidak mempunyai kemampuan-kemampuan seperti itu, maka kita akan ketinggalan, dan dipandang sebagai orang yang tidak profesional. Suatu pekerjaan profesional perlu didukung oleh kompetensi perilaku, kompetensi kualifikasi teknologi, dan kompetensi kepribadian sebagai berikut:

Kompetensi Perilaku, yang meliputi:

1. Kompetensi Profesi: kemampuan melaksanakan dan mengontrol pekerjaan secara profesional dan ekonomis.
2. Kompetensi Metode: kemampuan untuk menentukan langkah-langkah kerja dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu secara mandiri, merumuskan dan mengevaluasi permasalahan pada pekerjaan yang sedang dihadapi dan menentukan alternatif pemecahannya.
3. Kompetensi Sosial: kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan mempertumbuhkan aspek-aspek sosial seperti memperhatikan lingkungan hidup, mengindahkan keselamatan kerja dan tidak merugikan orang lain, menyelesaikan tugas dan menanggulangi masalah yang ditemui diperlukan komunikasi dan kerjasama dengan orang lain serta kesediaan untuk berkompromi.
4. Kompetensi Belajar: di dalam kompetensi belajar adanya kesanggupan mengembangkan diri sendiri melalui belajar mengumpulkan informasi, mencoba dan berlatih.

Kompetensi Kualifikasi Teknologi, meliputi:

1. Interdisipliner

Dalam hal ini orang perlu memiliki kesanggupan untuk:

- a. memahami dan memperhatikan struktur organisasi
- b. mampu menggunakan terminologi asing secara tepat dan benar
- c. mampu mengoperasionalkan komputer
- d. memperhatikan aspek ekologi dan ekonomi

2. Teknik Operasional

Dalam hal ini orang perlu memiliki kemampuan untuk:

- a. menganalisis tugas dan menyusun rencana kerja
- b. memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku
- c. mengenal masalah yang dihadapi dan tahu cara mengatasinya
- d. melakukan komunikasi lisan maupun tulisan
- e. menggunakan bahan dan energi secara hemat

Kompetensi Kepribadian

Orang perlu memiliki sifat kepribadian sebagai berikut:

1. Mandiri
2. Kreatif
3. Jujur
4. Penuh pengertian
5. Komunikatif
6. Kooperatif dan kompromis

Kompetensi perilaku, kualifikasi teknologi dan kepribadian tersebut diatas merupakan modal dasar untuk dapat hidup di dalam bekerjasama dengan bangsa lain di era globalisasi ini. Era dimana kita harus mempunyai wawasan yang mem "bumi".

Era globalisasi menuntut manusia yang memiliki keunggulan efektif dan produktif secara fisik, sosial, mental dan spiritual. Keunggulan efektif produk pada diri seseorang secara mental tidak hanya memiliki kemampuan kecerdasan rasional tapi juga memiliki kecerdasan emosional.

Goleman (1999 :45) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan mampu memotivasi diri, memiliki empati dan kecakapan sosial, serta menghadapi frustasi, dan mampu mengendalikan dorongan hati.

DAMPAK GLOBALISASI PADA TATANAN KELUARGA



tuntutan globalisasi yang bertujuan pada penerapan hak azasi manusia dan profesionalisasi di berbagai lingkup kehidupan akan memberikan pengaruh yang luas pada tatanan kehidupan keluarga, khususnya menghadirkan anggota keluarga yang benar-benar tahan banting akan tuntutan hidup di era globalisasi dan manusia yang mampu menyesuaikan diri di dalam kemandirian dengan dari oleh kemampuan berkreasi, jujur, penuh pengertian, komunikatif, kooperatif dan kompromis.

Tuntutan seperti diatas tidak akan terlalu menjadi permasalahan bagi keluarga yang selalu berusaha melaksanakan fungsinya dengan ajeg yang diramu di dalam tatana kehidupan yang diwarisi oleh kebiasaan kerja disiplin, tertib, hati-hati, hemat, efektif, dan produktif.Dampak globalisasi pada keluarga seperti ini hanyalah lebih berupaya meningkatkan tindakan dan produk perilaku dan material yang lebih canggih untuk mampu bersaing di dalam bekerjasama dengan orang lain.

Namun dalam kenyataan kehidupan dewasa ini yang dilalui melalui kehidupan di masa pembangunan dan reformasi pembangunan, ada kehidupan keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut :1) Pria tidak lagi menjadi kekuatan ekonomis; 2) Wanita atau ibu tidak lagi tergantung secara ekonomis; 3) Masalah ekonomis dapat mengakibatkan kurangnya kontrol keluarga terhadap anak-anak; 4) Kurangnya fungsi keluarga sebagai tempat rekreasi 5) Bertambah kecilnya pelaksanaan fungsi protektif; 6) Menekankan pentingnya sekolah 7) Sekularisasi dalam kehidupan beragama; 8) Status keluarga menjadi kurang penting; dan 9) Bertambah melemahnya elemen kasih sayang dalam keluarga, karena sebelumnya keluarga sudah banyak kehilangan fungsinya.

Realita kehidupan keluarga sebagai dampak lemahnya pelaksanaan fungsi keluarga dapat melahirkan kehidupan keluarga dengan model kepribadian keluarga yang menyimpang. Misalnya keluarga yang berantakan (broken home), keluarga kuasa (otoriter), keluarga protektif (over protection), keluarga simbiotis dan keluarga traumatis. Keadaan keluarga dengan model relasi dan komunikasi antar keluarga seperti ini otomatis akan menjadi lingkungan hidup bagi anak-anak yang lahir dari keluarga itu. Oleh karena itu lingkungan hidup seseorang ditentukan oleh orang-orang yang membina keluarga itu. Perjuangan untuk mencapai kehidupan keluarga yang seimbang ditentukan pula oleh usaha melaksanakan setiap peranan sebagai istri atau suami, ayah atau ibu yang menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Lunturnya fungsi keluarga sebagai tatanan hidup sebagai dampak dari pertumbuhan masyarakat dan dunia dewasa ini, perlu menjadi perhatian bagi para pengelola pendidikan untuk selalu memperhatikan gejala perubahan masyarakat dan dunia yang diimbangi dengan upaya terus menerus memberikan informasi tentang cara-cara melaksanakan pendidikan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya gejala melemahnya fungsi keluarga, maka segera perlu dilakukan komunikasi pengertian dan wawasan tentang kehidupan keluarga yang dapat diharapkan dalam masa reformasi pembangunan dewasa ini, untuk lebih bisa menyesuaikan diri pada tuntutan era globalisasi. Kesadaran akan pentingnya keluarga sebagai lingkungan hidup pertama akan membawa kita dan para pendidik (orang tua, guru, pemuka masyarakat, dan pemimpin negara) pada keadaan lebih memperhatikan fungsi dan tugasnya dalam keluarga.

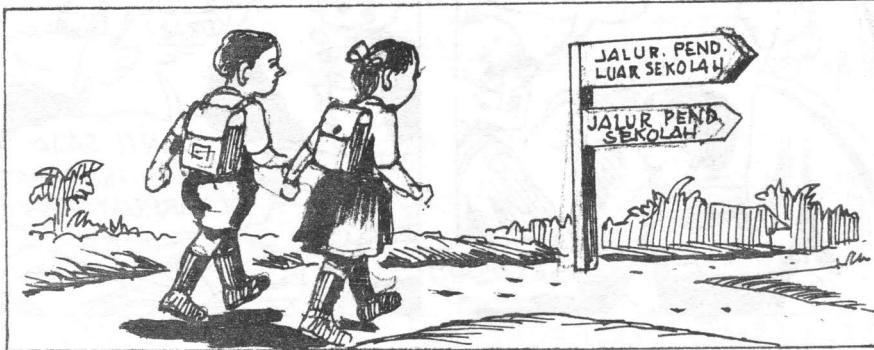
LINGKUP TATANAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI ERA GLOBALISASI



ecara sederhana, lingkup pendidikan dalam keluarga seyogyanya meliputi butir-butir sebagai berikut:

1. Unsur dan nilai yang terliput dalam kebudayaan dimana keluarga itu hidup. Dimana keluarga memberdayakan diri untuk mampu mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan
2. Nilai dan perilaku pergaulan sosial psikologi antar insani yang meliputi:sopan santun, bahasa, dan perangkat komunikasi lainnya.
3. Kehidupan yang bermoral dalam tuntutan norma susila yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.
4. Kehidupan beragama dalam mempersiapkan diri menjadi seorang umat yang beriman dan bertaqwā untuk berkembang menjadi insan husnul khotimah
5. Pembinaan kehidupan psikologis yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian individu

Dengan demikian Pendidikan Kehidupan Keluarga dapat diprogramkan di dalam jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. (sumber: hasil curah pendapat, bidang Jarahnitra, Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat). ■



DoeI Dali

REFORMASI

Endang Dj.



ADAKAH KEJADIAN SEPERTIINI DITEMPAT KERJA ANDA?



**Minal Aidzin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Bathin**

dari :

Segenap Redaksi Gita Setra dan Keluarga Besar BPKB Jayagiri